

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

emyyuana.2022@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Yuana Emi Rhomadhiyah/Paguyuban PKL Perwira Pancasila

Masukan Masyarakat

Mohon izin menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman dan kondisi yang dialami langsung oleh pedagang resmi di sekitar lapangan Pancasila.

Kami pada prinsipnya mendukung penataan PKL oleh Pemerintah Daerah demi ketertiban kota dan kepastian hukum. Namun demikian, dalam praktik di lapangan, terdapat sejumlah kebijakan yang justru menimbulkan rasa ketidakadilan, khususnya bagi pedagang resmi yang selama ini telah berusaha mematuhi aturan.

Salah satu permasalahan utama adalah kebijakan penataan pedagang liar yang tidak disertai penegakan aturan yang tegas. Pedagang liar yang sebelumnya berjualan tanpa izin di ruang publik, alih-alih ditertibkan secara konsisten, justru diarahkan untuk masuk ke shelter pedagang resmi. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pedagang resmi yang sejak awal telah mengikuti ketentuan perizinan dan berusaha memenuhi kewajiban retribusi.

Penataan tersebut juga berdampak pada meningkatnya persaingan usaha di dalam shelter, tanpa adanya jaminan peningkatan jumlah pengunjung atau daya beli. Pedagang resmi yang telah lama berjualan merasa dirugikan karena harus berbagi ruang dan peluang usaha dengan pedagang yang sebelumnya tidak taat aturan.

Selain itu, skema retribusi yang diberlakukan di shelter, yaitu sebesar Rp35.000 per shift (6 jam), dinilai tidak mempertimbangkan kondisi usaha yang fluktuatif. Aktivitas jual beli tidak selalu ramai sepanjang hari. Keramaian sangat bergantung pada cuaca, waktu, dan adanya kegiatan tertentu. Pada rencana ketentuan sebelumnya, saat kondisi hujan atau sepi pedagang tetap diwajibkan membayar retribusi meskipun tidak memperoleh pendapatan yang sepadan. Hal ini dirasa semakin memberatkan pedagang resmi yang selama ini telah berusaha menaati aturan.

Kami juga menerima keluhan terkait besaran rencana retribusi sebelumnya yang mencapai Rp105.000 per hari (jika berjualan dari pagi hingga malam) dengan alasan penggunaan lahan berjualan seluas kurang lebih 3 x 4 meter, yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan riil pedagang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga mengusulkan peninjauan ulang terhadap sistem pembagian shift berjualan. Sistem tiga shift sehari dengan durasi masing-masing enam jam dinilai kurang efektif dan tidak selaras dengan pola aktivitas perdagangan di lapangan. Dalam praktiknya, waktu berjualan yang terlalu singkat justru membatasi kesempatan pedagang untuk memperoleh pendapatan yang layak, sementara kewajiban retribusi tetap berjalan.

Oleh karena itu, kami mengusulkan agar sistem shift diubah menjadi dua shift per hari, dengan durasi waktu yang lebih proporsional, yaitu

shift pertama: 06.00–14.00 WIB

shift kedua: 14.00–22.00 WIB

Skema dua shift ini diharapkan dapat memberikan kepastian waktu usaha yang lebih memadai bagi pedagang, meningkatkan potensi pendapatan, serta menciptakan efisiensi dalam pengelolaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, kami menegaskan bahwa:

1. Penataan pedagang liar harus dibarengi dengan penegakan aturan yang adil dan tegas, agar tidak merugikan pedagang resmi yang telah patuh.
2. Kebijakan penempatan pedagang liar ke shelter perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kapasitas, dampak persaingan, dan keberlangsungan usaha pedagang resmi.
3. Penetapan retribusi harus mencerminkan asas keadilan, dengan perhitungan yang transparan dan mempertimbangkan kondisi usaha yang tidak menentu.
4. Sistem pembagian waktu berjualan (shift) perlu disesuaikan dengan realitas usaha di lapangan agar tidak memberatkan pedagang.
5. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pedagang resmi memperoleh perlindungan dan kepastian usaha, bukan justru menanggung dampak dari ketidaktertiban yang terjadi sebelumnya.

Melalui public hearing ini, kami berharap Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat menjadi regulasi yang adil, konsisten, dan berpihak kepada pedagang yang telah berusaha taat aturan, sekaligus menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Kota Salatiga.

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

liestyatiasri@gmail.com


Nama / Perwakilan Instansi

Rica mentok pak munyink

Masukan Masyarakat

. Mengenai retrebusi kami juga manut dan ttp membayar walaupun sebenarnya sangat berat mengingat kondisi lapangan Pancasila tidak seperti dulu sekarang sepi apalagi kalau musim hujan SDH tidak ada pembeli masukan berkurang,juga jam kita berjualan sangat pendek shg dng adanya retrebusi sangat memberatkan pedagang .maka kami mengusulkan agar pemerintah dpt menetapkan tarif harian yg bisa kita jangkau agar beban pedagang tdk terlalu berst

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

 1770296097872...

 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

atikasari2512@gmail.com


Nama / Perwakilan Instansi

Suriyah

Masukan Masyarakat

Kami tidak menolak retribusi, namun penetapannya perlu mencerminkan asas keadilan dan kondisi usaha di lapangan yang tidak menentu. Retribusi yang bersifat tetap, tanpa mempertimbangkan cuaca, tingkat keramaian, dan jam efektif berjualan, berpotensi memberatkan pedagang resmi. Oleh karena itu kami mengusulkan agar perhitungan retribusi dilakukan secara transparan, ada batas maksimal harian, serta mekanisme penyesuaian ketika pedagang tidak dapat berjualan secara optimal.

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

 1770299042791...

 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

listuhayu2@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Endang sri maryatun

Masukan Masyarakat

Kemarin peraturan terkait retribusi PKL di lapangan pancasila tiba-tiba disahkan tanpa adanya pertimbangan atau penjaringan aspirasi dari masyarakat yang terlibat. Maka kami mengusulkan agar kedepannya skema retribusi diberlakukan terlebih dahulu sebagai masa uji coba dan dievaluasi secara berkala dengan melibatkan perwakilan pedagang. Dengan begitu kami merasa dilibatkan, bukan hanya sekedar dituntut untuk patuh terhadap aturan yang bahkan kami tidak ketahui bagaimana dasar studi dan proses pengesahannya.

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

hendysaputra518@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

PKL PERWIRA

Masukan Masyarakat

Untuk retrebusi saya manut saja, pokoknya tidak memberatkan para pedagang PKL perwira, untuk shift mohon kami berharap untuk menjadi 2 Shift, dgn alasan kondisi lpgan yg sdh tidak seramai pembeli seperti dulu, jika dibagi 3 Shift waktu yg begitu pendek, yg mn blm selesai menata dagangan, blm ada tamu, kita sdh hrs kukut, maka dr itu untuk shift ini kami memohon untuk dijadikan 2 shift sj 🙏🙏

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

📁 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

sunaryatnorichatun@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Rochatun / Perwira Pancasila

Masukan Masyarakat

Restribusi diturunkan biar tidak mencekik masyarakat pedagang kecil dan pedagang liar yg tdk ikut aturan ditertibkan dan di bersihkan.

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

andimonica882@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Andi Saputra

Masukan Masyarakat

Saya berharap retribusi tidak memberatkan dan di tarik harian.

Untuk shift mohon di buat 2 shift, karena jika 3 shift waktu nya terlalu pendek karena kita harus menata dulu untuk mempersiapkan dagangan.

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

sitimak626@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Warsiti

Masukan Masyarakat

Ssya mohon dengan sangat Pkl Perwira Pancasila dibikin fua sif saja karna kita bisa berantem ke sama2pedagang karna memburu waktu untuk jualan karna waktu sangat pendek kita dorong grobak baru persiapan waktu jualan sudah habis gimana mau dapat uang dagang sepi waktu singkat mohon kebijaksanaannya ya Bapak supaya kita bisa usaha dapat uang retribusi diturun kan ditarik i tiap hari

(Warsiti)

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

notes_IMG_2026...

↑ Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

nandanmaetofa2@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Pkl malam shopping . Jljendral sudirman

Masukan Masyarakat

* adanya jalan tol sangat mempengaruhi jumlah pengunjung masuk ke kota salatiga

Dibantu agar segera di buka pintu toll pabelan

* mohon dibantu untuk masalah premanisme yg mengatasnamakan keamanan serta pengamen yg mengganggu pengunjung

*peninjauan kembali retribusi pkl

*salatiga dikenal sebagai tempat pkl kuliner 24 jam nonstop. Tidakada di tempat /kota lain

Dan salatiga juga pernah sebagai percontohan pkl untuk kota2 lain . Tapisekarang kondisi berbeda banyak pkl yg tutup.

Mohon di bantu kami pak

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

↑ Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Masukan Perda PKL:

1. Pasal 7 ayat 2 penataan harusnya pendataan
2. Pasal 7 ayat 2....urusan pemerintahan bidang perdagangan
3. Pasal 10 ayat 2.. jenis tempat usaha tidak bergerak ditambahkan sentra
4. Pasal 10 ayat 5...jenis kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih mungkin bisa ditambahkan
5. Pasal 21....masih menyebut bupati....
6. Pasal 21 huruf q.. perlu dipertimbangkan tenggang waktunya, sebaiknya 1 bulan atau berapa?
7. Pasal 25 ayat 1.....konsistensi masalah urusan.....sebaiknya urusan perdagangan..
8. Pasal 32....masih ada penyebutan pemerintahan desa/ kepala desa.
9. Perlunya tambahan bab yang mengatur tentang sanksi
10. Larangan PKL dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PKL.
11. Apakah perlu untuk nominal denda administratif dijelaskan lagi, siapa yang melakukan tindakan denda serta sistematisnya seperti apa untuk dijelaskan di pasal atau ayat terpisah?
12. Apakah perlu sekalian ditambahkan tindakan Pidana terhadap pelanggaran PKL?
13. Perlunya tambahan bab yang mengatur tentang retribusi.
14. Apakah perlu sekalian disebutkan dan diatur OPD pengampu untuk masing tugasmisalkan: DPMPTSP, SATPOL PP dll

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

indonesiarajawaliteknik@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Nico

Masukan Masyarakat

Penertiban PKL tidak hanya bersifat pengurusan tetapi harus di sertai sanksi tegas kepada PKL yg masih menggunakan trotoar / bahu jalan agar suasana kota tetap bersih, aman, nyaman tidak ada kemacetan / penumpukan kendaraan.

Kalau sejak awal sanksi tegas dilakukan akan mengurangi perseteruan antara satpol pp dengan pedagang. Karena jika peraturan jelas & sanksi jelas maka pedagang akan berpikir untuk berjualan di lahan yg sudah ditentukan . Tetapi hal ini akan bisa terlaksana dengan baik jika peraturan TDK hanya sekedar peraturan saja tetapi ada penindakan dan pengawasan dari yg berwenang.

Contohnya : peraturan ttg pengemis/pengamen yg ada pelarangan untuk mengamen/meminta minta di setiap lampu merah, sampai sekarang masih banyak yg ngamen / meminta minta tetapi tidak ada tindakan dari Pemda / yg berwenang untuk menegur dan memberikan sosialisasi baik kepada masyarakat pengguna jalan atau bagi pengamen/ peminta minta agar taat pada peraturan perda yg sudah dipasang disetiap lampu merah disalatiga

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

↑ Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

pramunia335@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Ani pramunia sari

Masukan Masyarakat

Dari rencana pelaksanaan aturan terkait retribusi pedagang di lapangan pancasila tahun 20204-2025 kemarin, apabila kami dagang/berjualan seharian, maka besaran retribusi bisa mencapai Rp105.000/hari (memberatkan).

Maka kami mengusulkan agar pemerintah dapat menetapkan tarif harian yang lebih rasional dan terjangkau dibandingkan akumulasi per shift, agar beban pedagang tidak berlipat ganda.

Contohnya, berapa pun shift atau lamanya berjualan yang akan ditetapkan nanti, kami berharap besaran retribusi yang kami bayarkan tidak lebih dari 10.000 rupiah per hari.

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

↑ Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

pakdedy453@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Dedi hariyanto / PKL PERWIRA PANCASILA

Masukan Masyarakat

- retribusi TDK lebih dari 10rb
- jam tayang hanya 2 shift
- tertibkan PKL liar yg TDK punya payung hukum

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

📁 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

listuhayu2@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Endang /Paguyuban pwrwira pancasila

Masukan Masyarakat

Minta PKL paguyuban pancasila dijadikan 2 siiip kayak dulu lagi, untuk redistribusi minta tidak lebih dari 10rb, dan mohon untuk PKL liar yang nempel di bahu lapangan untuk dibersihkan itu sangat mengganggu selain kita paguyuban juga mengganggu lalulintas karena tidak seharusnya berjualan nempel di lapangan

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

↑ Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

ambarwati31656@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Perwira Pancasila

Masukan Masyarakat

Berharap di buat 2 shift
Retribusi perhari di bawah 10.000.

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

📁 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

sititsw@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Siti Taszwyah / PKL Perwira Pancasila

Masukan Masyarakat

1. Turunkan retribusi. Tidak lebih dari 5 ribu per hari. Mohon untuk di tarik i setiap hari.
2. Bersihkan pedagang yang tidak resmi. Yang tidak ada kejelasan tempat jualan.
3. Kembalikan 2 shif. Tidak tambah pedagang baru. Yang libur jualan untuk lahan parkir.
4. Kalaupun yang menempel di lapangan ada izin untuk berjualan. Maka berikan tempat untuk kami.

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

↑ Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulir Masukan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Raperda sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Email *

liestyatiasri@gmail.com

Nama / Perwakilan Instansi

Joko sulistyio

Masukan Masyarakat

Kami mohon shep dikembalikan seperti dulu menjadi 2 salep
Kami ingin retribusi tidak lebih dari 10 ribu mohon kebijaksanaan bapak
Kami mau pedagang liar ditertipkan terimakasih

Unggah Masukan dalam Bentuk Dokumen

📁 Add file

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms